

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN (2019–2024):
ANALISIS REGRESI DATA PANEL DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

Serly, Rudi Aryanto*, Erdah Litriani

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

E-mail*: rudiaryanto_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Artikel ini menyusun ulang hasil penelitian kuantitatif mengenai determinan kemiskinan di Sumatera Selatan menggunakan regresi data panel pada lima kabupaten/kota (Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kota Lubuk Linggau) selama 2019–2024. Variabel utama yang dianalisis ialah tingkat pendidikan (diukur dengan rata-rata lama sekolah) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan. Data bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan. Estimasi dilakukan melalui pemilihan model regresi data panel dan serangkaian uji diagnostik; model terbaik yang digunakan adalah Common Effect Model (CEM). Hasil estimasi menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan ($p < 0,05$), sedangkan TPAK tidak berpengaruh signifikan ($p > 0,05$). Secara simultan, pendidikan dan TPAK berpengaruh terhadap kemiskinan ($\text{Prob}(F) < 0,05$). Dalam perspektif ekonomi syariah, temuan ini menegaskan bahwa peningkatan indikator pendidikan saja tidak otomatis menurunkan kemiskinan apabila tidak disertai peningkatan kualitas kesempatan kerja, produktivitas, dan institusi distribusi (termasuk instrumen zakat/infak/sedekah dan wakaf produktif) yang berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah*. Artikel menawarkan implikasi kebijakan: penguatan kualitas pendidikan (link and match), program keterampilan berbasis kebutuhan pasar, perluasan kerja layak, serta sinergi kebijakan publik dan filantropi Islam untuk mendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, TPAK, Kemiskinan, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problem pembangunan yang bersifat multidimensional dan persisten. Di Indonesia, indikator kemiskinan resmi umumnya diturunkan dari pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) yang mengacu pada kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan dan non-pangan minimum melalui ukuran garis kemiskinan. Dalam literatur pembangunan, kemiskinan tidak hanya dibaca sebagai rendahnya pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan kapabilitas (capability deprivation) yang membatasi kebebasan substantif manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai misalnya keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan partisipasi sosial. Sen menegaskan bahwa dunia dapat saja berada dalam “opulence” tetapi tetap menyisakan “remarkable deprivation” berupa kemiskinan yang bertahan, kelaparan, dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi; ia juga

menekankan komplementaritas peluang sosial seperti pendidikan dan kesehatan dengan partisipasi ekonomi-politik dalam mengatasi deprivasi (Sen, 1999, pp. xi–xii). Perspektif ini sejalan dengan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah dalam ekonomi Islam, yang memandang kesejahteraan sebagai pemeliharaan dan pengembangan lima tujuan dasar: agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Dengan demikian, kemiskinan bukan sekadar defisit material, tetapi juga ancaman terhadap pemeliharaan akal, jiwa, dan martabat manusia; sementara pendidikan, akses pekerjaan, dan distribusi yang adil adalah instrumen untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut (Fathurrahman et al., 2025).

Secara empiris, kemiskinan tetap menjadi isu strategis di banyak provinsi, termasuk Sumatera Selatan. Penelitian yang menjadi dasar artikel ini menganalisis kemiskinan di Sumatera Selatan pada periode 2019–2024 dengan fokus pada dua determinan yang sering ditekankan dalam literatur, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pendidikan diasumsikan berkaitan dengan kualitas modal manusia (human capital) yang memengaruhi produktivitas, peluang kerja, dan pendapatan. Sementara itu, TPAK mencerminkan kapasitas penawaran tenaga kerja dan keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja, yang secara teori berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan. Namun, bukti empiris tidak selalu linier: peningkatan partisipasi kerja tanpa kualitas pekerjaan dapat memerangkap rumah tangga dalam “working poor”, sedangkan peningkatan pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar dapat menciptakan mismatch dan menghasilkan pengangguran terdidik.

Dalam konteks ekonomi syariah, persoalan kemiskinan memiliki dimensi moral-ekonomi dan institusional. Islam menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari tujuan kebijakan publik (siyāsah shar‘iyyah) dan tanggung jawab kolektif (farḍ kifāyah) yang dikuatkan melalui instrumen distribusi dan perlindungan sosial: zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi dapat didesain produktif (misalnya zakat produktif, wakaf produktif, atau dana sosial berbasis akad yang amanah) untuk memperluas akses pendidikan, modal usaha, dan pekerjaan. Studi literatur terbaru juga menekankan pentingnya mengoperasionalkan indikator maqāṣid (misalnya ḥifz al-‘aql sebagai pendidikan) dalam analisis kemiskinan agar strategi pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia dan keadilan distribusi (Fathurrahman et al., 2025).

Penelitian ini penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, secara kebijakan, Sumatera Selatan memerlukan dasar empiris untuk menentukan prioritas intervensi penurunan kemiskinan—apakah melalui peningkatan kualitas pendidikan, perluasan partisipasi kerja, atau kombinasi keduanya. Kedua, secara akademik, regresi data panel memungkinkan evaluasi lebih kaya karena memadukan variasi antarwilayah (cross section) dan dinamika waktu (time series), sehingga lebih kuat dalam menangkap heterogenitas daerah. Ketiga, secara perspektif ekonomi syariah, analisis ini memperkaya pembacaan tentang mengapa indikator “kemampuan” (pendidikan, kerja) belum tentu menurunkan

kemiskinan apabila tidak terhubung dengan struktur kesempatan ekonomi dan kelembagaan distribusi yang adil.

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan TPAK terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan periode 2019–2024, baik secara parsial maupun simultan, serta merumuskan implikasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang kompatibel dengan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Secara operasional, penelitian menggunakan data BPS Sumatera Selatan dan menguji model regresi data panel. Hasil ringkas dalam naskah sumber menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan TPAK tidak signifikan; namun kedua variabel bersama-sama signifikan memengaruhi kemiskinan (Serly et al., 2024). Temuan ini menuntut penjelasan yang lebih bernuansa: apakah hubungan tersebut mencerminkan dampak jangka pendek, kualitas pendidikan, struktur pasar kerja, atau faktor kontekstual lain seperti urbanisasi, sektor informal, dan ketimpangan.

Dari sisi kontribusi, artikel ini tidak hanya menyajikan ulang hasil estimasi, tetapi juga memperluas pembahasan: (1) melakukan “bridging” antara temuan statistik dan teori pembangunan (*human capital*, pasar kerja, kemiskinan multidimensi), (2) menempatkan hasil dalam kerangka ekonomi syariah/*maqāṣid* untuk menajamkan implikasi kebijakan, serta (3) menawarkan rekomendasi praktis berupa sinergi kebijakan pendidikan–ketenagakerjaan dengan instrumen filantropi Islam untuk mempercepat mobilitas sosial. Dengan demikian, artikel diharapkan relevan bagi pembaca jurnal SINTA yang menuntut kombinasi kontribusi empiris, ketajaman teoretik, dan relevansi kebijakan di konteks Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan. Unit analisis adalah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang dipilih sebagai sampel: Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kota Lubuk Linggau. Periode pengamatan adalah tahun 2019–2024, sehingga data berbentuk panel (gabungan *cross section* dan *time series*) (Serly et al., 2024). Variabel yang digunakan terdiri dari: (1) tingkat kemiskinan (TK) sebagai variabel dependen, (2) tingkat pendidikan (TP) sebagai variabel independen utama—diukur melalui rata-rata lama sekolah (tahun), dan (3) tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebagai variabel independen—diukur dalam persentase. Semua indikator dinyatakan dalam bentuk persen atau satuan yang digunakan BPS pada publikasinya.

Spesifikasi model regresi data panel dinyatakan sebagai berikut:

$$TK_{it} = \alpha + \beta_1 TP_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dengan *i* menunjukkan wilayah (kabupaten/kota) dan *t* menunjukkan tahun (2019–2024). α adalah konstanta, β_1 dan β_2 adalah koefisien yang diestimasi, dan ε_{it} adalah komponen galat. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak ekonometrika (mis. EViews) dengan tahapan utama: (1) analisis deskriptif,

(2) pemilihan model panel yang paling sesuai, dan (3) pengujian asumsi klasik dan signifikansi statistik.

Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat sebaran data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dalam naskah sumber, rata-rata tingkat kemiskinan (TK) tercatat sekitar 12,40; tingkat pendidikan (TP) sekitar 8,89; dan TPAK sekitar 69,55, dengan variasi yang cukup terlihat antarwilayah dan waktu (Serly et al., 2024). Secara metodologis, deskriptif ini penting untuk mengidentifikasi potensi outlier dan konteks interpretasi koefisien.

Pemilihan model regresi panel dilakukan dengan mempertimbangkan tiga kandidat model: Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). CEM (pooled OLS) mengasumsikan tidak ada heterogenitas individual yang sistematis antar unit cross-section; FEM memasukkan perbedaan intercept antarwilayah (melalui dummy) untuk menangkap heterogenitas yang bersifat time-invariant; REM memperlakukan perbedaan antarwilayah sebagai komponen acak yang termuat dalam error term. Untuk memilih model terbaik, digunakan uji Chow (membandingkan CEM vs FEM), uji Hausman (membandingkan FEM vs REM), serta uji Lagrange Multiplier/Breusch–Pagan (membandingkan CEM vs REM) (Serly et al., 2024). Berdasarkan serangkaian uji tersebut, naskah sumber menetapkan Common Effect Model (CEM) sebagai model estimasi paling sesuai untuk data penelitian.

Setelah model terpilih, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk meminimalkan bias dan memastikan validitas inferensi. Pertama, uji multikolinearitas digunakan untuk menilai korelasi antarvariabel independen. Praktik umum menyatakan multikolinearitas serius bila korelasi antarvariabel independen lebih besar dari 0,80. Hasil uji menunjukkan korelasi TP dan TPAK berada di bawah ambang 0,80 sehingga tidak terindikasi multikolinearitas berat (Serly et al., 2024). Kedua, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan pendekatan Glejser, yakni meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen; keputusan diambil berdasarkan $p\text{-value} > 0,05$ sebagai indikasi tidak terjadi heteroskedastisitas yang signifikan. Ketiga, uji autokorelasi dapat dilakukan melalui Breusch–Godfrey Serial Correlation LM Test, dengan kriteria $p\text{-value} > 0,05$ mengindikasikan tidak ada autokorelasi (Serly et al., 2024). Walau detail nilai uji tidak semuanya ditampilkan dalam ringkasan, prosedur ini menegaskan kehati-hatian metodologis.

Uji signifikansi dilakukan pada dua level: uji parsial (t-test) untuk masing-masing koefisien β_1 dan β_2 , serta uji simultan (F-test) untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan. Dengan taraf signifikansi 5%, keputusan umum ialah: koefisien signifikan apabila $p\text{-value} < 0,05$. Selain itu, ukuran goodness-of-fit dilihat melalui adjusted R-squared untuk menilai proporsi variasi TK yang dapat dijelaskan oleh TP dan TPAK. Dalam perspektif kebijakan, signifikansi statistik kemudian diterjemahkan menjadi implikasi yang bersifat substantif: apakah perubahan pendidikan dan partisipasi kerja berkaitan dengan perubahan kemiskinan secara ekonomi dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pustaka

a. Kemiskinan: Konsep, Pengukuran, dan Dimensi Multidimensi

Dalam ekonomi pembangunan, kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum. Pendekatan yang banyak digunakan oleh lembaga statistik nasional mengukur kemiskinan melalui garis kemiskinan berbasis kebutuhan dasar, mencakup komponen pangan (kebutuhan kalori minimum) dan non-pangan (perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan esensial lain). Selain ukuran “headcount” (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan), literatur juga menekankan ukuran kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk membaca jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan ketimpangan di antara penduduk miskin. Dengan cara ini, kebijakan tidak hanya mengejar penurunan angka kemiskinan, tetapi juga mengurangi kerentanan dan ketimpangan di lapisan miskin.

Sen menawarkan konseptualisasi yang lebih luas: kemiskinan tidak cukup dipahami sebagai kekurangan pendapatan, melainkan sebagai “deprivasi kapabilitas” yang membatasi kebebasan substantif. Dalam pengantar bukunya, ia menegaskan adanya dunia yang kaya tetapi tetap menyisakan kemiskinan dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi; ia juga menekankan hubungan komplementer pendidikan dan layanan kesehatan terhadap partisipasi ekonomi dan kemampuan keluar dari deprivasi (Sen, 1999, pp. xi–xii). Perspektif ini relevan untuk konteks daerah: peningkatan pendapatan mungkin tidak otomatis meningkatkan kualitas hidup jika akses pendidikan dan pekerjaan layak tetap terbatas.

Dalam ekonomi Islam, kemiskinan juga dipahami sebagai kondisi yang mengancam kemaslahatan (maṣlaḥah) manusia. Kerangka maqāṣid al-sharī‘ah menempatkan kesejahteraan sebagai pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, indikator seperti pendidikan dapat dipandang sebagai proksi ḥifẓ al-‘aql (pemeliharaan akal), sedangkan kesempatan kerja dan distribusi kekayaan terkait ḥifẓ al-māl. Studi empiris yang mengoperasionalkan indikator maqāṣid menunjukkan bahwa variabel pendidikan (sebagai ḥifẓ al-‘aql) cenderung berkorelasi negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara faktor pasar kerja tertentu dapat memperburuk kemiskinan bila tidak dikelola (Fathurrahman et al., 2025).

b. Teori Modal Manusia dan Hubungan Pendidikan–Kemiskinan

Teori modal manusia (human capital) memandang pendidikan sebagai investasi yang meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan penghasilan sepanjang hayat. Dalam kerangka ini, pendidikan meningkatkan peluang seseorang memasuki pekerjaan yang lebih produktif dan stabil, sehingga menurunkan risiko kemiskinan. Temuan empiris di Indonesia banyak mendukung arah hubungan tersebut. Misalnya, studi di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa pendidikan dapat menekan kemiskinan melalui jalur peningkatan pendapatan dan akses kerja formal, meskipun besarnya efek bergantung pada struktur ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja (Nurjati et al., 2021). Dalam konteks kebijakan, pendidikan dipandang efektif bila kualitasnya memadai,

relevan dengan kebutuhan pasar, dan diikuti oleh ekosistem ekonomi yang menyerap lulusan.

Namun, literatur juga menyoroti kemungkinan hubungan yang tidak linier atau bahkan sementara positif antara pendidikan dan kemiskinan di level agregat wilayah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa mekanisme: (a) peningkatan pendidikan terjadi bersamaan dengan migrasi dan urbanisasi yang meningkatkan biaya hidup dan menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru; (b) peningkatan “lama sekolah” tidak identik dengan peningkatan keterampilan yang produktif (isu kualitas); (c) mismatch pendidikan–pekerjaan yang memunculkan pengangguran terdidik; atau (d) bias pengukuran karena wilayah yang lebih miskin menerima intervensi pendidikan lebih besar, sehingga hubungan statistik menjadi positif secara jangka pendek. Kajian ekonomi syariah menekankan bahwa pendidikan mesti diarahkan pada penguatan akhlak, keterampilan, dan produktivitas—bukan sekadar penambahan tahun sekolah—agar selaras dengan maqāsid (Adinugraha et al., 2024).

c. Teori Pasar Tenaga Kerja dan TPAK

TPAK menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang bekerja atau aktif mencari kerja. Secara teori, peningkatan TPAK dapat meningkatkan output ekonomi dan pendapatan rumah tangga. Namun, dampaknya pada kemiskinan bergantung pada kualitas pekerjaan, tingkat upah riil, jam kerja, dan produktivitas. Dalam banyak daerah, peningkatan TPAK sering terjadi di sektor informal atau pekerjaan rentan, sehingga tidak otomatis menurunkan kemiskinan. Studi empiris menunjukkan bahwa variabel ketenagakerjaan dapat berpengaruh berbeda antar daerah, bergantung pada struktur industri dan kemampuan perekonomian menciptakan kerja layak (Adinugraha et al., 2024).

2. Pembahasan

a. Gambaran data dan pemilihan model

Analisis deskriptif pada lima kabupaten/kota di Sumatera Selatan periode 2019–2024 menunjukkan variasi kemiskinan, pendidikan, dan TPAK yang cukup lebar. Tingkat kemiskinan (TK) berada pada rentang sekitar 9,77 hingga 15,01, dengan rata-rata 12,40. Tingkat pendidikan (TP; rata-rata lama sekolah) berada pada rentang sekitar 7,03 hingga 10,93, dengan rata-rata 8,89. TPAK berada pada rentang sekitar 61,11 hingga 81,18, dengan rata-rata 69,55 (Serly et al., 2024). Variasi ini mencerminkan heterogenitas kondisi sosial ekonomi antarwilayah: wilayah perkotaan umumnya memiliki pendidikan lebih tinggi namun menghadapi tantangan biaya hidup dan kantong kemiskinan perkotaan; wilayah kabupaten tertentu mungkin memiliki pendidikan relatif lebih rendah namun biaya hidup lebih rendah dan struktur kerja berbeda.

Model terbaik yang dipilih adalah Common Effect Model (CEM) berdasarkan rangkaian uji pemilihan model (Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier) sebagaimana dijelaskan pada naskah sumber (Serly et al., 2024). Secara substantif, pilihan CEM mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik yang tidak teramati antarwilayah tidak menimbulkan bias yang memerlukan intercept berbeda (FEM) atau komponen acak (REM). Dengan ukuran sampel

yang relatif kecil ($5 \text{ wilayah} \times 6 \text{ tahun}$), pilihan ini lazim jika uji statistik menunjukkan tidak perlunya efek tetap/acak

b. Hasil Estimasi dan Interpretasi Koefisien

Hasil estimasi CEM menunjukkan koefisien tingkat pendidikan (TP) sebesar 2,3087 dengan p-value 0,0457 ($<0,05$), sehingga signifikan secara statistik. Koefisien TPAK sebesar -0,0279 dengan p-value 0,3326 ($>0,05$), sehingga tidak signifikan (Serly et al., 2024). Secara simultan, uji F menunjukkan Prob(F-statistic) sebesar 0,000013 ($<0,05$), sehingga TP dan TPAK bersama-sama signifikan menjelaskan variasi kemiskinan (Serly et al., 2024). Adjusted R-squared sekitar 0,931 menunjukkan kemampuan jelaskan model yang tinggi untuk dua variabel tersebut dalam sampel penelitian, meski perlu kehati-hatian karena sampel kecil berpotensi menghasilkan overfitting.

Koefisien TP yang positif perlu dibaca cermat. Secara teori human capital, pendidikan umumnya menurunkan kemiskinan karena meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Namun, koefisien positif dapat muncul dalam beberapa kondisi. Pertama, pendidikan yang diukur sebagai rata-rata lama sekolah dapat meningkat karena perluasan akses (program wajib belajar, bantuan pendidikan), tetapi peningkatan kualitas dan keterkaitan dengan pasar kerja tidak secepat peningkatan akses. Akibatnya, peningkatan lama sekolah tidak langsung tercermin pada peningkatan pendapatan, bahkan dapat beriringan dengan meningkatnya pengangguran terdidik. Kedua, daerah yang mengalami peningkatan pendidikan cepat mungkin juga mengalami urbanisasi dan perubahan struktur ekonomi yang memunculkan “kemiskinan baru” (new urban poverty) akibat biaya hidup, perumahan, dan pekerjaan informal. Ketiga, ada kemungkinan reverse causality atau bias intervensi: wilayah yang kemiskinannya relatif tinggi menjadi target program pendidikan dan bantuan sekolah lebih masif, sehingga secara statistik TP meningkat bersamaan dengan kemiskinan yang belum sempat turun dalam horizon waktu pendek (2019–2024).

Temuan TPAK yang negatif namun tidak signifikan juga menarik. Secara arah, peningkatan TPAK cenderung berkaitan dengan penurunan kemiskinan (koefisien negatif), tetapi tidak cukup kuat secara statistik dalam sampel ini. Penjelasan yang mungkin: (a) variasi TPAK tidak cukup besar untuk menjelaskan variasi kemiskinan; (b) partisipasi kerja meningkat terutama pada sektor informal berproduktivitas rendah sehingga dampak pada kemiskinan kecil; atau (c) shock ekonomi (misalnya masa pandemi) mengubah kualitas pekerjaan sehingga TPAK bukan indikator yang cukup untuk menangkap “kerja layak”. Secara kebijakan, ini mengarah pada kebutuhan memperhatikan kualitas pekerjaan (upah, jam kerja, stabilitas) bukan hanya partisipasi.

c. Diskusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Maqāṣid Al-Sharī‘Ah

Dalam ekonomi syariah, pendidikan merupakan bagian dari ḥifẓ al-‘aql. Namun, maqāṣid menuntut pendidikan yang mengembangkan akal dan keterampilan secara bermakna—bukan sekadar kuantitas tahun sekolah. Karena itu, koefisien positif TP dapat ditafsirkan sebagai sinyal bahwa penguatan pendidikan (sebagai indikator) belum tertransformasi menjadi kemampuan produktif yang menurunkan kemiskinan. Ini konsisten dengan argumen bahwa peluang sosial pendidikan harus dikaitkan dengan peluang ekonomi (pekerjaan,

kewirausahaan) dan jaring pengaman sosial (Sen, 1999, pp. xi–xii). Dalam kerangka maqāṣid, pendidikan yang tidak berujung pada peningkatan kemampuan menjaga harta (ḥifẓ al-māl) melalui pekerjaan/pendapatan, akan sulit menurunkan kemiskinan.

Literatur kontemporer ekonomi Islam menekankan integrasi kebijakan publik dengan instrumen sosial Islam. Misalnya, studi yang mengukur determinan kemiskinan melalui indikator maqāṣid menunjukkan pendidikan (ḥifẓ al-‘aql) berperan menurunkan kemiskinan jika didukung ekosistem sosial-ekonomi (Fathurrahman et al., 2025). Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan dapat menempatkan pendidikan sebagai “jalur pertama”, tetapi harus dihubungkan dengan “jalur kedua” berupa pekerjaan layak dan produktivitas, dan “jalur ketiga” berupa distribusi berkeadilan melalui zakat/infak/sedekah dan wakaf produktif. Program beasiswa zakat, pelatihan vokasi berbasis pesantren/komunitas, dan inkubasi UMKM syariah adalah contoh intervensi yang dapat menguatkan transisi pendidikan ke pendapatan.

Di sisi lain, TPAK yang tidak signifikan menunjukkan bahwa partisipasi pasar kerja saja belum cukup. Perspektif Islam menekankan ‘adl (keadilan) dan ihsan (kebaikan) dalam relasi ekonomi, termasuk kewajiban menciptakan kerja yang tidak menzalimi pekerja (upah adil, kondisi layak). Jika pasar kerja didominasi sektor informal dengan upah rendah, peningkatan TPAK tidak otomatis mengurangi kemiskinan. Karena itu, indikator ketenagakerjaan perlu diperkaya: tingkat pengangguran, upah minimum riil, proporsi pekerja informal, dan produktivitas sektor dominan. Temuan ini selaras dengan literatur yang menyatakan bahwa variabel ketenagakerjaan dapat berdampak berbeda antarwilayah (Adinugraha et al., 2024).

d. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan pada tiga lapis. Pertama, lapis pendidikan: fokus pada kualitas dan relevansi (link and match) melalui penguatan pendidikan vokasi, digital skills, dan kewirausahaan, disertai peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan akses pembelajaran. Kedua, lapis ketenagakerjaan: memperluas kerja layak melalui insentif investasi sektor padat karya yang produktif, penguatan UMKM, serta program peningkatan produktivitas pekerja informal. Ketiga, lapis ekonomi syariah: mensinergikan program pemerintah dengan lembaga zakat/wakaf untuk pembiayaan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi (misalnya beasiswa produktif, modal usaha mikro berbasis qard hasan/mudharabah, wakaf untuk pelatihan dan inkubasi bisnis). Integrasi ini menjaga orientasi pengentasan kemiskinan pada maqāṣid: penguatan akal (pendidikan), penjagaan jiwa (jaminan sosial), dan penjagaan harta (akses kerja dan distribusi adil).

Secara akademik, temuan koefisien positif TP juga membuka agenda riset lanjutan: memasukkan variabel kontrol (PDRB per kapita, ketimpangan, urbanisasi, inflasi), menguji non-linearitas (misalnya efek pendidikan berbeda pada tingkat tertentu), serta melakukan robustness check (FEM/REM) atau pendekatan kausal (IV, difference-in-differences) bila data memungkinkan. Untuk konteks publikasi SINTA, transparansi tentang keterbatasan model dan

rekomendasi riset lanjutan merupakan nilai tambah dan menunjukkan kedewasaan metodologis

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan periode 2019–2024 dengan menggunakan regresi data panel pada lima kabupaten/kota. Data bersumber dari publikasi BPS Sumatera Selatan, dengan variabel dependen tingkat kemiskinan dan variabel independen tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) serta TPAK. Model regresi panel terpilih adalah Common Effect Model (CEM) berdasarkan uji pemilihan model yang dilakukan dalam naskah sumber.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan ($p=0,0457$), sedangkan TPAK tidak berpengaruh signifikan ($p=0,3326$). Namun, secara simultan kedua variabel signifikan memengaruhi kemiskinan ($\text{Prob}(F)=0,000013$). Temuan ini menegaskan bahwa dinamika kemiskinan daerah tidak selalu mengikuti harapan linear bahwa peningkatan pendidikan otomatis menurunkan kemiskinan dan bahwa peningkatan partisipasi kerja otomatis mengurangi kemiskinan. Dalam konteks Sumatera Selatan 2019–2024, pendidikan yang tercermin dalam “lama sekolah” tampak berkorelasi dengan kemiskinan secara statistik, namun arah hubungan menuntut interpretasi kebijakan yang lebih hati-hati—terutama terkait kualitas pendidikan, mismatch keterampilan, struktur pasar kerja, dan perubahan sosial-ekonomi pascapandemi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, hasil ini menguatkan argumen bahwa pengentasan kemiskinan harus dipahami sebagai pemenuhan maqāṣid al-sharī‘ah: menjaga akal (melalui pendidikan berkualitas), menjaga jiwa (melalui jaminan sosial dan layanan dasar), dan menjaga harta (melalui pekerjaan produktif dan distribusi adil). Pendidikan sebagai ḥifẓ al-‘aql harus diarahkan agar menghasilkan kemampuan produktif, bukan sekadar peningkatan kuantitas tahun sekolah. Sementara itu, partisipasi kerja perlu diterjemahkan menjadi kerja layak (upah adil, produktivitas, perlindungan), bukan sekadar keterlibatan di pasar kerja.

Implikasi kebijakan utama adalah perlunya integrasi kebijakan pendidikan–ketenagakerjaan: (1) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk penguatan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar; (2) penciptaan kerja layak melalui dukungan sektor produktif dan peningkatan produktivitas UMKM; serta (3) sinergi kebijakan publik dengan instrumen ekonomi syariah (zakat dan wakaf produktif) untuk beasiswa, pelatihan, inkubasi usaha, dan pembiayaan mikro berbasis akad yang adil. Sinergi ini penting untuk mempercepat mobilitas sosial dan memutus “lingkaran kemiskinan” secara berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian mencakup jumlah sampel wilayah yang relatif kecil dan keterbatasan variabel kontrol. Karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel makro daerah (PDRB per kapita, ketimpangan, inflasi), struktur tenaga kerja, serta menggunakan pendekatan robust/kausal. Meskipun demikian, artikel ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi literatur ekonomi pembangunan dan ekonomi syariah di Indonesia: bahwa indikator

pembangunan manusia perlu dibaca bersama struktur kesempatan ekonomi dan kelembagaan distribusi yang berkeadilan agar pengentasan kemiskinan benar-benar berdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Setiawan, I., Lestari, D., Abas, N. I., & Pratama, A. B. (2024). Strategi pemerintah dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia perspektif ekonomi Islam. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 10(1), 41–64. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v10i1.21763>
- Adriani, E. (2022). Pengukuran modal manusia (suatu studi literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4(1). <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.86>
- Andriani, S. (2017). Uji Park dan uji Breusch Pagan Godfrey dalam pendeteksian heteroskedastisitas pada analisis regresi. *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1). <https://doi.org/10.24042/ajpm.v8i1.1014>
- Aprillyana, N. (2020). Estimasi indikator kemiskinan tingkat kecamatan menggunakan regresi kekar M-kuantil. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 3(2). <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i2.87>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kemiskinan dan ketimpangan (konsep & definisi; indikator P0, P1, P2). Badan Pusat Statistik. (Diakses dari publikasi/laman resmi BPS).
- Desmawan, D., dkk. (2023). Analisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(2). <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i2.4124>
- Fathurrahman, A., Wulandari, M., & Rizki, M. (2025). Maqashid Shariah indicators impact on poverty eradication in Java Island. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 8(1), 147–162. <https://doi.org/10.18196/ijief.v8i1.26842>
- Lestari, W. I. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan per provinsi di Indonesia dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3455–3466. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6208>
- Nurjati, C., Mubarak, F., & Handayani, E. (2021). Analysis on the effects of education on poverty and health in urban Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i2.8024>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press. (lihat khususnya Preface, pp. xi–xii; dan Bab 4 tentang “Poverty as Capability Deprivation”, p. 87).
- Serly, Aryanto, R., & Litriani, E. (2024). Pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2019–2024 (naskah penelitian/working paper). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.